



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2014
(AUDITED)**

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Pernyataan Telah Direviu	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	6
III. Ringkasan Catatan atas Laporan Keuangan	
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.1. Dasar Hukum	7
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.4. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	18
B.2. Belanja Negara	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	
C.1. Aset Lancar	30
C.2. Aset Tetap	40
C.3. Aset Lainnya	50
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	51
C.5. Ekuitas Dana Lancar	54
C.5. Ekuitas Dana Investasi	55
D. Pengungkapan Penting Lainnya	
D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	56
D.2. Pengungkapan Lain-lain	57
Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 – Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013

Hal

22

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN KOMISI YUDISIAL RI TAHUN 2014

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI untuk tahun anggaran 2014 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Komisi Yudisial RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 26 Januari 2015

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,



Ir. Ronny Dolfinus Tulak, M.M
NIP. 195907021987031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.195.308.428,00 atau mencapai ~ persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp.0,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp.76.247.107.091,00 atau mencapai 98,10 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.77.720.059.000,00.

Realisasi Belanja (Transaksi Kas) pada TA 2014 adalah sebesar Rp.75.668.152.184,00 atau mencapai 97,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.77.720.059.000,00 sedangkan Realisasi Belanja (Transaksi Non Kas) pada TA 2014 adalah sebesar Rp.578.954.907,00 atau mencapai ~ persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.0,00

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013

Uraian	TA 2014			TA 2013
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	195.308.428,00	~	210.012.315,00
Jumlah Pendapatan	-	195.308.428,00	~	210.012.315,00
BELANJA				
Belanja Transaksi Kas	77.720.059.000,00	75.668.152.184,00	97,36	86.467.948.133,00
Belanja Pegawai	15.412.115.000,00	14.313.904.560,00	92,87	9.068.853.519,00
Belanja Barang	60.022.832.000,00	59.076.072.149,00	98,42	72.383.977.476,00
Belanja Modal	2.285.112.000,00	2.278.175.475,00	99,70	5.015.117.138,00
Belanja Transaksi Non Kas	-	578.954.907,00	~	-
Belanja Pegawai Non Kas	-	-	-	-
Belanja Barang Non Kas	-	578.954.907,00	~	-
Belanja Modal Non Kas	-	-	-	-
Jumlah Belanja	77.720.059.000,00	76.247.107.091,00	98,10	86.467.948.133,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp121.389.266.315,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.047.112.965,00. Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp118.012.118.552,00. Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp2.330.034.798,00.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp51.421.462,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp121.337.844.853,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp995.691.503,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp120.342.153.350,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

*Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013*

NAMA AKUN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2014	2013	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	35.764.346,00	0,00	35.764.346,00	~
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	562.100.085,00	0,00	562.100.085,00	~
Piutang Bukan Pajak	4.198.210.301,00	4.302.030.241,00	(103.819.940,00)	(2,41)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	(4.198.210.301,00)	0,00	(4.198.210.301,00)	~
Persediaan	449.248.534,00	547.186.590,00	(97.938.056,00)	(17,89)
Jumlah Aset Lancar	1.047.112.965,00	4.849.216.831,00	(3.802.103.866,00)	(78,40)
Aset Tetap				
Tanah	47.188.389.400,00	47.188.389.400,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	37.293.888.820,00	35.897.228.395,00	1.396.660.425,00	3,89
Gedung dan Bangunan	70.841.354.266,00	70.623.104.266,00	218.250.000,00	0,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.530.800.628,00	3.530.800.628,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	741.191.281,00	741.191.281,00	0,00	0,00
Kontruksi Dalam Pengerjaan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(41.612.505.843,00)	(35.982.437.380,00)	(5.630.068.463,00)	15,64
Jumlah Aset Tetap	118.012.118.552,00	122.027.276.590,00	(4.015.158.038,00)	(3,29)
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	2.330.034.798,00	1.838.089.798,00	491.945.000,00	26,76
Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	2.330.034.798,00	1.838.089.798,00	491.945.000,00	26,76
Jumlah Aset	121.389.266.315,00	128.714.583.219,00	(7.325.316.904,00)	(5,69)

NAMA AKUN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2014	2013	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Kewajiban				
Utang kepada Pihak Ketiga	5.850.454,00	16.161.480,00	(10.311.026,00)	(63,80)
Pendapatan di terima di muka	10.512.664,00	72.900.667,00	(62.388.003,00)	(85,57)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	35.058.344,00	0,00	35.058.344,00	~
Jumlah Kewajiban	51.421.462,00	89.062.147,00	(37.640.685,00)	(42,26)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar				
Cadangan Piutang	0,00	4.302.030.241,00	(4.302.030.241,00)	(100,00)
Cadangan Persediaan	449.248.534,00	547.186.590,00	(97.938.056,00)	(17,89)
Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	(5.144.452,00)	(89.062.147,00)	83.917.695,00	(94,22)
Barang/Jasa yang harus diterima	562.100.085,00	0,00	562.100.085,00	~
Barang/Jasa yang harus diserahkan	(10.512.664,00)	0,00	(10.512.664,00)	~
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	995.691.503,00	4.760.154.684,00	(3.764.463.181,00)	(79,08)
Ekuitas Dana Investasi				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	118.012.118.552,00	122.027.276.590,00	(4.015.158.038,00)	(3,29)
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	2.330.034.798,00	1.838.089.798,00	491.945.000,00	26,76
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	120.342.153.350,00	123.865.366.388,00	(3.523.213.038,00)	(2,84)
Ekuitas Dana	120.337.844.853,00	128.625.521.072,00	(7.287.676.219,00)	(5,66)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	121.389.266.315,00	128.714.583.219,00	(7.325.316.904,00)	(5,69)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2014			TA 2013
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	195.308.428,00	~	210.012.315,00
Jumlah Pendapatan	-	195.308.428,00	~	210.012.315,00
BELANJA				
Belanja Transaksi Kas				
Belanja Pegawai	15.412.115.000,00	14.313.904.560,00	92,87	9.068.853.519,00
Belanja Barang	60.022.832.000,00	59.076.072.149,00	98,42	72.383.977.476,00
Belanja Modal	2.285.112.000,00	2.278.175.475,00	99,70	5.015.117.138,00
Belanja Transaksi Non Kas				
Belanja Pegawai Non Kas	-	-	-	-
Belanja Barang Non Kas	-	578.954.907,00	~	-
Belanja Modal Non Kas	-	-	-	-
Jumlah Belanja	77.720.059.000,00	76.247.107.091,00	98,10	86.467.948.133,00

II. NERACA

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(dalam Rupiah)

NAMA AKUN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
	2014	2013	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Aset				
Aset Lancar				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	35.764.346,00	0,00	35.764.346,00	~
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	562.100.085,00	0,00	562.100.085,00	~
Piutang Bukan Pajak	4.198.210.301,00	4.302.030.241,00	(103.819.940,00)	(2,41)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	(4.198.210.301,00)	0,00	(4.198.210.301,00)	~
Persediaan	449.248.534,00	547.186.590,00	(97.938.056,00)	(17,89)
Jumlah Aset Lancar	1.047.112.965,00	4.849.216.831,00	(3.802.103.866,00)	(78,40)
Aset Tetap				
Tanah	47.188.389.400,00	47.188.389.400,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	37.293.888.820,00	35.897.228.395,00	1.396.660.425,00	3,89
Gedung dan Bangunan	70.841.354.266,00	70.623.104.266,00	218.250.000,00	0,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.530.800.628,00	3.530.800.628,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	741.191.281,00	741.191.281,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(41.612.505.843,00)	(35.982.437.380,00)	(5.630.068.463,00)	15,64
Jumlah Aset Tetap	118.012.118.552,00	122.027.276.590,00	(4.015.158.038,00)	(3,29)
Aset Lainnya				
Aset Tak Berwujud	2.330.034.798,00	1.838.089.798,00	491.945.000,00	26,76
Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya	2.330.034.798,00	1.838.089.798,00	491.945.000,00	26,76
Jumlah Aset	121.389.266.315,00	128.714.583.219,00	(7.325.316.904,00)	(5,69)
Kewajiban				
Utang kepada Pihak Ketiga	5.850.454,00	16.161.480,00	(10.311.026,00)	(63,80)
Pendapatan di terima di muka	10.512.664,00	72.900.667,00	(62.388.003,00)	(85,57)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	35.058.344,00	0,00	35.058.344,00	~
Jumlah Kewajiban	51.421.462,00	89.062.147,00	(37.640.685,00)	(42,26)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar				
Cadangan Piutang	0,00	4.302.030.241,00	(4.302.030.241,00)	(100,00)
Cadangan Persediaan	449.248.534,00	547.186.590,00	(97.938.056,00)	(17,89)
Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	(5.144.452,00)	(89.062.147,00)	83.917.695,00	(94,22)
Barang/Jasa yang harus diterima	562.100.085,00	0,00	562.100.085,00	~
Barang/Jasa yang harus diserahkan	(10.512.664,00)	0,00	(10.512.664,00)	~
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	995.691.503,00	4.760.154.684,00	(3.764.463.181,00)	(79,08)
Ekuitas Dana Investasi				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	118.012.118.552,00	122.027.276.590,00	(4.015.158.038,00)	(3,29)
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	2.330.034.798,00	1.838.089.798,00	491.945.000,00	26,76
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	120.342.153.350,00	123.865.366.388,00	(3.523.213.038,00)	(2,84)
Ekuitas Dana	121.337.844.853,00	128.625.521.072,00	(7.287.676.219,00)	(5,66)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	121.389.266.315,00	128.714.583.219,00	(7.325.316.904,00)	(5,69)

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI YUDISIAL RI

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Yudisial RI yang dibentuk sebagai perwujudan pelaksanaan amanah UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004 yang selanjutnya telah direvisi dengan UU No.18 Tahun 2011 merupakan perwujudan reformasi lembaga peradilan dan demokratisasi lembaga peradilan. Prinsip demokrasi secara umum mensyaratkan adanya tindakan "*checks and balances*" untuk menjamin tidak terjadinya dominasi satu pihak terhadap pihak yang lain dimana dalam kaitan ini adalah dominasi lembaga peradilan terhadap masyarakat pencari keadilan.

Visi Komisi Yudisial RI adalah terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur dan profesional.

Misi Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan profesional.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien.
- c. Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
- d. Mejaga kehormatan, keluhuan martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- e. Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Rencana aktivitas Komisi Yudisial RI berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai kewenangan dan tugas yang diembannya, secara garis besar dijabarkan sebagai berikut:

- a. *Aktivitas pengusulan Calon Hakim dan Hakim Agung*; demi terwujudnya lembaga peradilan yang berkarakter dan berkompetensi melalui pelaksanaan pendaftaran, seleksi dan penetapan *Calon Hakim dan Hakim Agung* yang memenuhi kriteria karakter dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan amanah penegakkan kehormatan dan keluhuran martabat lembaga peradilan.
- b. *Aktivitas pengelolaan*; mengupayakan pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim sebagai instrument peradilan, baik untuk maksud pengembangan *reward system* maupun untuk pengembangan *checks and balances* demi penegakkan kehormatan dan keluhuran lembaga peradilan.

- c. *Aktivitas pengawasan*; mengupayakan terselenggaranya pola pengawasan perilaku hakim oleh masyarakat melalui mekanisme pengaduan yang cepat dan akurat, dalam upaya penegakan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan dan serta kehati-hatian hakim dalam memutuskan perkara.
- d. *Aktivitas pengendalian*; mengupayakan tindakan cepat dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap perilaku para hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim agar tidak berkembang menjadi ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sehingga berakibat menurunnya kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan lembaga peradilan.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Yudisial RI. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Yudisial RI adalah sebagai berikut:

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan*

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja*

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Aset*

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa

depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang
Jangka
Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainnya.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan
Akuntansi atas
Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyusutan
Aset Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Negara dan Hibah

Rp195.308.428,00

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp195.308.428,00 atau mencapai ~ persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Komisi Yudisial RI adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2014		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	0,00	15.769.000,00	~
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	0,00	103.557.600,00	~
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	75.981.828,00	~
Jumlah	0,00	195.308.428,00	~

Berdasarkan Tabel 6, Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN dan PNBP lainnya mengalami penurunan sebesar Rp14.703.887,00 atau 7,00 persen dibandingkan TA 2013.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013

Uraian	Realisasi TA 2014	Realisasi TA 2013	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	0,00	7.550.000,00	(100,00)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	15.769.000,00	140.545.000,00	(88,78)
Pendapatan Denda	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	103.557.600,00	0,00	~
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu	75.981.828,00	61.916.955,00	22,72
Pendapatan Lain-lain	0,00	360,00	(100,00)
Jumlah	195.308.428,00	210.012.315,00	(7,00)

Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN

Yaitu berupa Pembayaran sewa sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial sebesar Rp15.769.000,00 untuk Counter/Kios kantin seluas 69m² dengan jangka waktu 12 bulan, terhitung mulai tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Sebagian Halaman Untuk Counter/Kios kantin antara Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dengan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia (KPKY RI) nomor:PERJ-01/BU.KY/8/2014.

2. Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi

Yaitu berupa Pendapatan Pengembalian Kerugian Negara dalam kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat sebesar Rp103.557.600,00 tanggal 28 Februari 2014.

3. Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran Yang Lalu yaitu berupa:

- a) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pengembalian belanja perjalanan dinas Jakarta-Aceh (PP) tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2013 an. Nur Agus Susanto dengan Kuitansi Nomor K.14.048 sebesar Rp491.000,00.
- b) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa penyetoran atas kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sofa Meubelair Rumah Jabatan Ketua Komisi Yudisial RI Tahun 2013 an. CV. Bintang Mas sebesar Rp1.500.000,00.
- c) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa penyetoran atas kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebagai Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 an. Roejito Rp570.000,00 dengan Kuitansi Nomor K.10.012.
- d) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa penyetoran atas kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebagai Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 an. Heru Purnomo Rp570.000,00 dengan Kuitansi Nomor K.10.011.
- e) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa penyetoran atas kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebagai Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 an. Danang Wijayanto

- Rp570.000,00 dengan Kuitansi Nomor K.10.009.
- f) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa penyetoran atas kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebagai Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 an. J. Kwartanto Rp570.000,00 dengan Kuitansi Nomor K.10.007.
 - g) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian kendaraan bermotor an.Dr. Taufiqurrohman.S, S.H., M.H sebesar Rp17.497.500,00.
 - h) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian kendaraan bermotor an.Suparman Marzuki, Imam Anshori, Ibrahim, Abbas Said, Eman Suparman sebesar @Rp1.458.125,00 (pembayaran ke-1 dari 12 kali)
 - i) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian kendaraan bermotor an.Suparman Marzuki, Imam Anshori, Ibrahim, Abbas Said, Eman Suparman sebesar @Rp1.458.125,00 (pembayaran ke-2 dari 12 kali)
 - j) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa kekurangan nilai SKTJM atas kelebihan pembayaran uang layanan penanganan/penyelesaian laporan masyarakat dan uang layanan persidangan sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 sebesar Rp262.340,00.
 - k) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian kendaraan bermotor an.Dr. Jaja Ahmad Jayus sebesar Rp17.497.500,00.
 - l) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian kendaraan bermotor an.Suparman Marzuki, Imam Anshori, Ibrahim, Abbas Said, Eman Suparman sebesar @Rp1.458.125 (pembayaran ke-3 dari 12 kali)
 - m) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian

kendaraan bermotor an.Suparman Marzuki, Imam Anshori, Ibrahim, Abbas Said, Eman Suparman sebesar @Rp1.458.125 (pembayaran ke-4 dari 12 kali)

- n) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa pembayaran Pajak Penghasilan atas Pembayaran Tunai Tunjangan Kredit pembelian kendaraan bermotor an.Suparman Marzuki, Imam Anshori, Ibrahim, Abbas Said, Eman Suparman sebesar @Rp1.458.125 (pembayaran ke-5 dari 12 kali)

B.2. Belanja Negara (Transaksi Kas)

Realisasi Belanja

(Transaksi Kas)

Rp75.668.152.184,00

Realisasi belanja (Transaksi Kas) Komisi Yudisial RI pada TA 2014 adalah sebesar Rp75.668.152.184,00 atau sebesar 97,36 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp126.104.590,00. Anggaran Komisi Yudisial RI pada TA 2014 sebesar Rp77.720.059.000,00. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 menurut program tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2014

No	Uraian Program	Anggaran	Real TA 2014	% Realisasi terhadap Anggaran
01	Prog Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	50.334.125.000,00	48.523.187.098,00	96,40
02	Prog Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial	2.453.741.000,00	2.430.190.288,00	99,04
03	Prog Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim	24.932.193.000,00	24.714.774.798,00	99,13
Jumlah Belanja		77.720.059.000,00	75.668.152.184,00	97,36

Berdasarkan Tabel 8, Realisasi Belanja Brutomencapai 97,52 persen. Adapun realisasi Belanja Pegawai sebesar 92,93 persen, Belanja Barang sebesar 98,62 persen sedangkan Belanja Modal 99,70 persen.

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	15.412.115.000,00	14.322.088.622,00	92,93
Belanja Barang	60.022.832.000,00	59.193.992.677,00	98,62
Belanja Modal	2.285.112.000,00	2.278.175.475,00	99,70
Total Belanja Bruto	77.720.059.000,00	75.794.256.774,00	97,52
Pengembalian Belanja	-	(126.104.590,00)	-
Total Belanja Netto	77.720.059.000,00	75.668.152.184,00	97,36

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik 1.



Dibandingkan dengan TA 2013, realisasi belanja TA 2014 mengalami penurunan sebesar 12,49persen, penurunan realisasi terdapat pada jenis belanja yaitu belanja barang sebesar (18,39%) serta belanja modal sebesar (54,57%), sedangkan pada jenis belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 57,84% Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 9.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2014	Realisasi TA 2013	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	14.313.904.560,00	9.068.853.519,00	57,84
Belanja Barang	59.076.072.149,00	72.383.977.476,00	(18,39)
Belanja Modal	2.278.175.475,00	5.015.117.138,00	(54,57)
Jumlah Belanja	75.668.152.184,00	86.467.948.133,00	(12,49)

Belanja Pegawai
Rp14.313.904.560,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp14.313.904.560,00 dan Rp9.068.853.519,00. Terjadi kenaikan sebesar 57,84 persen. Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan adanya Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Rincian belanja pegawai disajikan dalam Tabel 10.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2014	Realisasi TA 2013	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	5.444.451.700,00	4.329.675.250,00	25,75
Belanja Pembulatan Gaji PNS	122.437,00	96.270,00	27,18
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	284.669.881,00	242.596.120,00	17,34
Belanja Tunj. Anak PNS	63.670.674,00	51.644.532,00	23,29
Belanja Tunj. Struktural PNS	715.030.000,00	606.680.000,00	17,86
Belanja Tunj. Fungsional PNS	12.870.000,00	20.545.000,00	(37,36)
Belanja Tunj. PPh PNS	113.157.890,00	89.915.829,00	25,85
Belanja Tunj. Beras PNS	294.911.680,00	240.987.780,00	22,38
Belanja Uang Makan PNS	949.642.000,00	713.845.000,00	33,03
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0,00	17.062.200,00	(100,00)
Belanja Tunjangan Umum PNS	348.280.000,00	280.630.000,00	24,11
Belanja Gaji Pokok Pejabat Negara	398.580.000,00	399.697.100,00	(0,28)
Belanja Pembulatan Gaji Pejabat Negara	1.200,00	5.600,00	(78,57)
Belanja Tunj. Suami/Istri Pejabat Negara	39.858.000,00	39.984.000,00	(0,32)
Belanja Tunj. Anak Pejabat Negara	13.650.000,00	13.624.800,00	0,18
Belanja Tunj. Struktural Pejabat Negara	1.079.000.000,00	1.094.100.000,00	(1,38)
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	154.949.720,00	161.692.825,00	(4,17)
Belanja Tunj. Beras Pejabat Negara	18.408.000,00	18.408.000,00	0,00
Belanja Uang Honor Tetap	760.900.000,00	771.950.000,00	(1,43)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	3.629.935.440,00	0,00	~
Jumlah Belanja Bruto	14.322.088.622,00	9.093.140.306,00	57,50
Pengembalian Belanja Pegawai	(8.184.062,00)	(24.286.787,00)	(66,30)
Jumlah Belanja Netto	14.313.904.560,00	9.068.853.519,00	57,84

Belanja Barang

Rp59.076.072.149,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp59.076.072.149,00 dan Rp Rp72.383.977.476,00. Realisasi Belanja barang mengalami penurunan 18,39 persen dari tahun anggaran sebelumnya. Penurunan realisasi Belanja Barang tersebut antara lain disebabkan adanya penurunan realisasi belanja barang non operasional sebesar (31,28%), realisasi belanja jasa sebesar (18,93%) serta realisasi belanja perjalanan dinas dalam negeri (22,91%). Rincian Belanja Barang disajikan dalam Tabel 11.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

Keterangan	TA 2014 (Rp)	TA 2013 (Rp)	Naik / (Turun) %
Belanja Barang Operasional	7.945.324.447,00	6.575.539.419,00	20,83
Belanja Barang Non-Operasional	16.486.379.147,00	23.992.252.031,00	(31,28)
Belanja Jasa	5.992.954.396,00	7.392.684.299,00	(18,93)
Belanja Pemeliharaan	7.470.396.245,00	7.157.666.205,00	4,37
Belanja Perjalanan Dinas DN	21.249.078.442,00	27.565.055.118,00	(22,91)
Realisasi Belanja Bruto	59.193.992.677,00	72.683.197.072 ,00	(18,56)
Pengembalian Belanja	(117.920.528,00)	(299.219.596,00)	(60,59)
Realisasi Belanja Netto	59.076.072.149,00	72.383.977.476,00	(18,39)

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal

Rp2.278.175.475,00

Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 adalah masing-masing sebesar Rp2.278.175.475,00 dan Rp5.015.117.138,00. Terjadi penurunan atas realisasi Belanja Modal dibandingkan tahun anggaran yang lalu sebesar (54,57) persen yang terlihat pada tabel 12. Penurunan realisasi Belanja Modal tersebut antara lain disebabkan adanya pengurangan anggaran Belanja Modal.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

Uraian Jenis Belanja	Realisasi TA 2014	Realisasi TA 2013	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.968.519.475,00	3.785.097.220,00	(47,99)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	244.800.000,00	473.222.700,00	(48,27)
Belanja Modal Lainnya	64.856.000,00	758.049.415,00	(91,44)
Jumlah Belanja Bruto	2.278.175.475,00	5.016.369.335,00	(54,59)
Pengembalian Belanja	(0,00)	(1.252.197,00)	(100,00)
Jumlah Belanja Netto	2.278.175.475,00	5.015.117.138,00	(54,57)

Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2014 sebesar Rp1.968.519.475,00 sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Inventaris Kantor KYRI sesuai dengan kuitansi/bukti pembayaran No.331-A/BA.PEMB/PPK-1.KY/03/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp32.569.375,00 an.CV.Topan Endah Mandiri, SPM Nomor:00218/KYRI/2014 tanggal 3 April 2014, SP2D Nomor:141331302001314 tanggal 10 April 2014.
- 2) Pengadaan Alat Pendukung Aplikasi Komisi Yudisial sesuai Kontrak No.346/SPK/99K-1.KY/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp92.322.100,00 an. PT.Godean Jaya Permai, SPM Nomor:00422/KYRI/2014 tanggal 22 Mei 2014, SP2D Nomor: 141331301017260 tanggal 13 Juni 2014.
- 3) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tahun Anggaran 2014, sesuai Kontrak No.716/Perj/PPK-1.KY/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp554.100.800,00 an.CV.Resik Karya Utama, SPM Nomor:00529/KYRI/2014 tanggal 20 Juni 2014, SP2D Nomor:141331302004857 tanggal 14 Juli 2014
- 4) Pengadaan *Operating System* Tahun Anggaran 2014, sesuai Kontrak No.896/Perj/PPK-1.KY/07/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp192.445.000,00 an.PT.Amtek Solusindo , SPM Nomor:00673/KYRI/2014 tanggal 12 Agustus 2014, SP2D Nomor:141331301031631 tanggal 4 September 2014
- 5) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2014, sesuai Kontrak No.1241/Perj/PPK-1.KY/09/2014 tanggal 8 September 2014 sebesar Rp243.309.000,00 an.PT.Khronz Indonesia, SPM Nomor:00815/KYRI/2014 tanggal 1 Oktober 2014, SP2D Nomor:141331301039175 tanggal 17 Oktober 2014
- 6) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1491-A/BA-PEMB/PPK-1.KY/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp20.837.500,00 an.PT.Sagatra Upaya Citra, SPM Nomor:01000/KYRI/2014 tanggal 11 Nopember 2014, SP2D Nomor:141331304000040 tanggal 13 Nopember 2014
- 7) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial

- Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1681-A/PEM/PPK.1/12/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp43.021.000,00 an.CV.Satuvisi Multimedia, SPM Nomor:01174/KYRI/2014 tanggal 12 Desember 2014, SP2D Nomor:141331304000040 tanggal 13 Nopember 2014
- 8) Pengadaan Aplikasi E-Monev Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1703-A/PEM/PPK.1/11/2014 tanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp49.400.000,00 an.CV.Global Mandiri Jaya, SPM Nomor:01183/KYRI/2014 tanggal 15 Desember 2014, SP2D Nomor:141331301058023 tanggal 19 Desember 2014
- 9) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Makassar, Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1632-A/PEM/PPK.1/11/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp38.951.000,00 an.CV.Rizqi Insani, SPM Nomor:01172/KYRI/2014 tanggal 12 Desember 2014, SP2D Nomor:141331302012915 tanggal 19 Desember 2014
- 10) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Semarang, Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1633-A/PEM/PPK.1/11/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp44.569.800,00 an.CV.Elsa Karya Sentosa, SPM Nomor:01182/KYRI/2014 tanggal 15 Desember 2014, SP2D Nomor:141331302012916 tanggal 19 Desember 2014
- 11) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1631-A/PEM/PPK.1/11/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp25.916.000,00 an.PT.Abadi Kencana Prakusya, SPM Nomor:01173/KYRI/2014 tanggal 12 Desember 2014, SP2D Nomor:141331303026389 tanggal 19 Desember 2014
- 12) Pengadaan Pemutakhiran Aplikasi MoU Komisi Yudisial, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1556-A/PEM/PPK.1/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp45.830.000,00 an.CV.Global Mandiri Jaya, SPM Nomor:01187/KYRI/2014 tanggal 16 Desember 2014, SP2D Nomor:141331301058411 tanggal 22 Desember 2014
- 13) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Palembang, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014, sesuai kontrak No.1632/SPK/PPK-1.KY/11/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebesar

- Rp59.063.400,00 an.CV.Duta Sejahtera, SPM
Nomor:01165/KYRI/2014 tanggal 11 Desember 2014, SP2D
Nomor:141331301058892 tanggal 23 Desember 2014
- 14)Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di
Manado, Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti
pembayaran No.1631/SPK/PPK-1.KY/11/2014 tanggal 25 Nopember
2014 sebesar Rp66.456.000,00 an.PT.Telaga Gelang Indonesia, SPM
Nomor:01162/KYRI/2014 tanggal 11 Desember 2014, SP2D Nomor:
141331301058893 tanggal 23 Desember 2014
- 15)Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di
Medan, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti
pembayaran No.1634-A/PEM/PPK.1/11/2014 tanggal 25 Nopember
2014 sebesar Rp43.272.500,00 an.CV.Tangga Rezeki, SPM
Nomor:01175/KYRI/2014 tanggal 12 Desember 2014, SP2D Nomor:
141331301058895 tanggal 23 Desember 2014
- 16)Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di
Pekanbaru, Riau Tahun Anggaran 2014, sesuai Kontrak
No.1633/SPK/PPK-1.KY/11/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebesar
Rp69.539.250,00 an.CV.Balasiong Telemidia, SPM
Nomor:01164/KYRI/2014 tanggal 11 Desember 2014, SP2D
Nomor:141331302013481 tanggal 23 Desember 2014
- 17)Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di
Kupang, NTT Tahun Anggaran 2014, sesuai kontrak
No.1634/SPK/PPK-1.KY/11/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebesar
Rp62.916.000,00 an.CV.Kemala, SPM Nomor:01163/KYRI/2014
tanggal 11 Desember 2014, SP2D Nomor: 141331302013482 tanggal
23 Desember 2014
- 18)Pengadaan Software untuk Web Conference Kantor Penghubung
Komisi Yudisial di Daerah Tahun Anggaran 2014, sesuai Kontrak
No.1486/SPK/PPK-1.KY/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 sebesar
Rp196.031.000,00 an.PT.V-Cube Indonesia, SPM
Nomor:01196/KYRI/2014 tanggal 9 Desember 2014, SP2D
Nomor:141331301059108 tanggal 24 Desember 2014
- 19)Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan untuk Web Conference
Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Tahun Anggaran 2014,
sesuai Kontrak No.1416/SPK/PPK-1.KY/10/2014 tanggal 13 Oktober

2014 sebesar Rp87.969.750,00 an.PT.Kreatif Dinamika Integrasi, SPM Nomor:01195/KYRI/2014 tanggal 19 Desember 2014, SP2D Nomor:141331302013662 tanggal 24 Desember 2014

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2014 sebesar Rp244.800.000,00 sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Workstation di Gedung Komisi Yudisial RI, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.226-A/BA.PEMB/PPK-1.KY/02/2014 tanggal 17 Februari 2014 sebesar Rp26.550.000,00 an.CV.Kencana Jaya, SPM Nomor:00220/KYRI/2014 tanggal 3 April 2014, SP2D Nomor:141331303002727 tanggal 10 April 2014
- 2) Pengadaan Perencanaan Tata Ruang Kerja Tenaga Ahli dan Ruang Pemeriksaan Lantai 3 Gedung Kantor Komisi Yudisial, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1191-A/BA.PEMB/PPK-1.KY/09/2014 tanggal 24 September 2014 sebesar Rp21.450.000,00 an.PT.Delta Elok Lestari, SPM Nomor:01060/KYRI/2014 tanggal 20 Nopember 2014, SP2D Nomor:141331301049279 tanggal 1 Desember 2014
- 3) Pengadaan Pekerjaan Layout Tata Ruang Kerja Tenaga Ahli dan Ruang Pemeriksaan Lantai 3 Gedung Kantor Komisi Yudisial sesuai kontrak No.1431/SPK/PPK-1.KY/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp196.800.000,00 an.PT.Bangun Maju Bersama, SPM Nomor:01198/KYRI/2014 tanggal 19 Desember 2014, SP2D Nomor:141331301059107 tanggal 24 Desember 2014

Sedangkan rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2014 berupa Pengadaan Software Pendukung Pengembangan Aplikasi KYRI sesuai kontrak No.1591/SPK/PPK-1.KY/11/2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp64.856.000,00 an.PT.Mitra Buana Komputindo, SPM Nomor:01159/KYRI/2014 tanggal 11 Desember 2014, SP2D Nomor:141331301058946 tanggal 23 Desember 2014

B.3. Belanja Negara (Transaksi Non Kas)

*Realisasi Belanja
(Transaksi Non Kas)
Rp578.954.907,00*

Realisasi belanja (Transaksi Non Kas) Komisi Yudisial RI pada TA 2014 adalah sebesar Rp578.954.907,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan Hibah Barang/Jasa dari *Aus AID* untuk program *Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)* berupa bantuan kegiatan.

Berdasarkan dokumen program *Subsidary Arrangement Between The Government of Australia and The Gormernment of The Republic of Indonesia*

Relating to The Australia Indonesia Partnership for Justice tanggal 2 Mei 2011 yang telah teregister dengan Nomor:2D76N3GB. Komisi Yudisial RI menerima pekerjaan berupa bantuan pelaksanaan kegiatan yaitu berupa:

- 1) Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemantauan ARAV di Makassar, Mataram, Medan dan Semarang tanggal 1 s.d. 5 September 2014. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) Nomor:3238/SET.KY/12/2014 tanggal 3 Desember 2014 dengan nilai Hibah sebesar Rp33.236.700,00. Kemudian Komisi Yudisial menerbitkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) Nomor:01265/KYRI/2014 tanggal 31 Desember 2014. Selanjutnya KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Persetujuan Pencatatan Hibah Langsung tanpa melalui KPPN dengan Nomor:141330500010007 tanggal 31 Desember 2014.
- 2) Kegiatan Sosialisasi di Empat (4) Wilayah (Makassar, Mataram, Medan dan Semarang) sebesar Rp114.358.307,00, Kegiatan Konsinyering Finalisasi Materi dan Persiapan Pelatihan Penghubung sebesar Rp37.679.395,00, Pelatihan Teknis Pemantauan dan Penggunaan ARAV sebesar Rp350.680.505,00, Kegiatan Penyusunan SOP Penggunaan ARAV (Jasa Konsultan) sebesar Rp30.000.000,00, Kegiatan Penyusunan Materi Optimalisasi Pengelolaan Hasil Rekaman dengan ARAV melalui Proses *Editing dan Processing* sebesar Rp13.000.000,00. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) Nomor:3389/SET/PR.01.03/12/2014 tanggal 19 Desember 2014 dengan nilai Hibah sebesar Rp545.718.207,00. Kemudian Komisi Yudisial menerbitkan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) Nomor:01268/KYRI/2014 tanggal 31 Desember 2014. Selanjutnya KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Persetujuan Pencatatan Hibah Langsung tanpa melalui KPPN dengan Nomor:141330500010008 tanggal 31 Desember 2014.

Aset Lancar

Rp1.047.112.965,00

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA**C.1. Aset Lancar**

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp1.047.112.965,00 dan Rp4.849.216.831,00

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 13.

Tabel 13
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013

No	NAMA AKUN	TA 2014	TA 2013
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	35.764.346,00	0,00
3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	562.100.085,00	0,00
4	Piutang Bukan Pajak	4.198.210.301,00	4.302.030.241,00
5	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(4.198.210.301,00)	0,00
6	Persediaan	449.248.534,00	547.186.590,00
	Jumlah Aset Lancar	1.047.112.965,00	4.849.216.831,00

Kas di Bendahara

Pengeluaran Rp0,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Komisi Yudisial telah melakukan penyetoran ke Kas Negara atas sisa Uang Persediaan TA 2014 sebesar Rp780.070.339,00 dengan NTPN 1001150802020103 pada tanggal 30 Desember 2014 dan penyetoran ke Kas Negara atas sisa dana Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp61.517,00 dengan NTPN 1410110712001503 pada tanggal 30 Desember 2014, sehingga saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 nihil.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp35.764.346,00

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp35.764.346,00 dan Rp0,00. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2014 muncul disebabkan terdapat pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih terdapat beberapa kendala dalam proses penyetoran, yaitu terdapat NPWP dan nama Wajib Pajak yang salah karena perubahan identitas wajib pajak sehingga belum bisa diproses lebih lanjut. Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai berikut:

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pembayaran Honorarium Narasumber dalam rangka kegiatan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Mega Mendung, Bogor tanggal 21 April 2014 sebesar Rp135.000,00 an.Heru Purnomo dengan Kuitansi nomor:K.05226.
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pembayaran Honorarium Narasumber dalam rangka kegiatan Pelantikan dan Public Expose Petugas Penghubung Komisi Yudisial RI Tahun 2014 Wilayah Pekanbaru-Riau tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp210.000,00 an.Yesri Elfis Hasugian, S.th dengan Kuitansi nomor:K.10155.
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pembayaran Honorarium Moderator dalam rangka kegiatan Tindak Lanjut Kerjasama antara KYRI dengan Univ.Pasundan Bandung dalam bentuk bedah buku Konsep Pengawasan Kehakiman di Bandung tanggal 24 Oktober 2014 sebesar Rp150.000,00 an.Hj.N.Ike Kusumiati, SH, M.Hum dengan Kuitansi nomor:K.10384.
- 4) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp307.500,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp61.500,00 untuk Pembayaran Tagihan Jasa Praposting/Pengepakan/Packing dalam rangka Pengiriman Dokumen di Lingkungan KYRI an.Koperasi Pegawai Pos Indonesia dengan Kuitansi nomor:K.09870.

- 5) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp209.750,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp41.950,00 untuk Pembayaran Tagihan Jasa Praposting/Pengepakan/Packing dalam rangka Pengiriman Dokumen di Lingkungan KYRI an.Koperasi Pegawai Pos Indonesia dengan Kuitansi nomor:K.09871.
- 6) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp283.500,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp56.700,00 untuk Pembayaran Tagihan Jasa Praposting/Pengepakan/Packing dalam rangka Pengiriman Dokumen di Lingkungan KYRI an.Koperasi Pegawai Pos Indonesia dengan Kuitansi nomor:K.09872.
- 7) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp336.500,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp67.300,00 untuk Pembayaran Tagihan Jasa Praposting/Pengepakan/Packing dalam rangka Pengiriman Dokumen di Lingkungan KYRI an.Kopposindo Jakarta Pusat dengan Kuitansi nomor:K.09899.
- 8) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp289.750,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp57.950,00 untuk Pembayaran Tagihan Jasa Praposting/Pengepakan/Packing dalam rangka Pengiriman Dokumen di Lingkungan KYRI an.Kopposindo Jakarta Pusat dengan Kuitansi nomor:K.09899.
- 9) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp4.090.909,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp613.636,00 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.PT.Lia Putri Sumanja dengan Kuitansi DOP nomor:K.00347.
- 10) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.318.182,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp347.727,00 untuk Pembayaran Bahan Publikasi untuk Kampanye Peradilan Bersih an.CV.Arif Persada dengan Kuitansi DOP nomor:K.00346.
- 11) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp3.090.909,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp463.636,00 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.PT.Pradiyamulti Karya Kencana dengan Kuitansi DOP nomor:K.00272.
- 12) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp3.881.818,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp582.273,00 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.CV.Triasmanti Sejahtera dengan Kuitansi DOP nomor:K.00268.

- 13) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp3.068.182,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp460.227,00 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.CV.Butur Pratama Jaya dengan Kuitansi DOP nomor:K.00264.
- 14) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.191.091,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp328.664,00 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.CV.Raka Pratama dengan Kuitansi DOP nomor:K.00373.
- 15) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp3.680.300,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp552.045,00 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.PT.Lia Putri Sumanja dengan Kuitansi DOP nomor:K.00385.
- 16) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp3.158.500,00 dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp473.775,00 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.CV.Unggul Rejo Abadi dengan Kuitansi DOP nomor:K.00402.
- 17) Sisa Dana Operasional Pimpinan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp706.002,00.
- 18) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pembayaran Honorarium Narasumber dalam rangka Reviu dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Pelantikan dan Publik Expose Penghubung Komisi Yudisial RI Tahun 2014 tanggal 12 November 2014 sebesar Rp540.000,- dengan Kuitansi nomor:K.11564.
- 19) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pembayaran Honorarium Narasumber dalam rangka Reviu dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Pelantikan dan Publik Expose Penghubung Komisi Yudisial RI Tahun 2014 tanggal 25 November 2014 sebesar Rp540.000,- dengan Kuitansi nomor:K.11565.
- 20) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pembayaran Honorarium Narasumber dalam rangka Perubahan Menu Tambah Mitra MoU pada Fornt and Back End Application tanggal 6 Oktober 2014 sebesar Rp540.000,- dengan Kuitansi nomor:K.12554.
- 21) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pembayaran Honorarium Narasumber dalam rangka Instalasi dan Setting Aplikasi system Informasi MoU tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp540.000,-

dengan Kuitansi nomor:K.12561.

- 22) Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Pembayaran Honorarium Narasumber dalam rangka Implementasi dan Uji Coba Data Dummy Aplikasi Sistem Informasi MoU tanggal 16 November 2014 sebesar Rp540.000,- dengan Kuitansi nomor:K.12563.

Sampai dengan Laporan Keuangan ini diterbitkan, pajak yang telah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, telah disetorkan kembali ke Kas Negara melalui Bank Persepsi sebesar Rp29.646.874,00 sehingga sisa pajak yang belum disetor sebesar Rp6.117.472,00. Adapun rincian pajak yang telah disetor adalah sebagai berikut:

No	Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
1	PPhPsl 21 untuk Pembayaran Honorarium Narasumber dalam rangka kegiatan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Mega Mendung, Bogor tanggal 21 April 2014 an.Heru Purnomo dengan Kuitansi nomor:K.05226	091215100 5150000	30 Jan 2015	135.000
2	PPh 21 untuk Pembayaran Honorarium Narasumber dalam rangka kegiatan Pelantikan dan Public Expose Petugas Penghubung Komisi Yudisial RI Tahun 2014 Wilayah Pekanbaru-Riau tanggal 16 Oktober 2014 an.Yesri Elfis Hasugian, S.th dengan Kuitansi nomor:K.10155	101212070 9070100	30 Jan 2015	210.000
3	PPN dan PPhPsl 22 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.PT.Lia Putri Sumanja dengan Kuitansi DOP nomor:K.0347	040412131 5060603 011505071 3010306	30 Jan 2015	4.090.909 613.636
4	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Pembayaran Bahan Publikasi untuk Kampanye Peradilan Bersih an.CV.Arif Persada dengan Kuitansi DOP nomor:K.0346	141206101 2040610 020715150 4120603	30 Jan 2015	2.318.182 347.727

No	Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Jumlah (Rp)
5	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.PT.Pradiyamulti Karya Kencana dengan Kuitansi DOP nomor:K.0272	151405150 1151502 070607011 3150903	30 Jan 2015	3.090.909 463.636
6	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.CV.Triasmanti Sejahtera dengan Kuitansi DOP nomor:K.0268	145051310 130911000 7020207	30 Jan 2015	3.881.818 582.273
7	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.CV.Butur Pratama Jaya dengan Kuitansi DOP nomor:K.0264	000707100 3101503 151005060 7060506	30 Jan 2015	3.068.182 460.227
8	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.CV.Raka Pratama dengan Kuitansi DOP nomor:K.0373	011311080 2061504 090807081 4080405	30 Jan 2015	2.191.091 328.664
9	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.PT.Lia Putri Sumanja dengan Kuitansi DOP nomor:K.0385	071015030 0060304 080310081 3110900	30 Jan 2015	3.680.300 552.045
10	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 untuk Pembayaran Bahan Kampanye Peradilan Bersih an.CV.Unggul Rejo Abadi dengan Kuitansi DOP nomor:K.0402	101307151 3060708 071307001 2011311	30 Jan 2015	3.158.500 473.775
Jumlah				29.646.874

Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp562.100.085,00

C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp562.100.085,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Adapun rician Belanja dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Sewa dibayar dimuka sebesar Rp59.643.750,00 untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sesuai Kontrak No.1191/SPK/PPK-1.KY/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014.
2. Pembayaran Sewa dibayar dimuka sebesar Rp44.458.334,00 untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Kpuang Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Kontrak No.1186/SPK/PPK-1.KY/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014.
3. Pembayaran Sewa dibayar dimuka sebesar Rp61.356.000,00 untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, sesuai Kontrak No.1189/SPK/PPK-1.KY/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
4. Pembayaran Sewa dibayar dimuka sebesar Rp49.296.667,00 untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kontrak No.1185/SPK/PPK-1.KY/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014.
5. Pembayaran Sewa dibayar dimuka sebesar Rp71.704.000,00 untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kontrak No.1188/SPK/PPK-1.KY/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014.
6. Pembayaran Sewa dibayar dimuka sebesar Rp33.230.000,00 untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Kuitansi/Bukti Pembayaran No.1210/K.PEMB/PPK-1.KY/09/2014 tanggal 1 September 2014.
7. Pembayaran Sewa dibayar dimuka sebesar Rp49.866.667,00

- untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sesuai Kontrak No.1187/SPK/PPK-1.KY/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
8. Pembayaran Sewa dibayar dimuka sebesar Rp73.333.334,00 untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kontrak No.1190/SPK/PPK-1.KY/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014.
 9. Pembayaran Sewa dibayar dimuka sebesar Rp58.100.000,00 untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, sesuai Kontrak No.1182/SPK/PPK-1.KY/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014.
 10. Pembayaran Sewa dibayar dimuka sebesar Rp61.111.333,00 untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kontrak No.1184/SPK/PPK-1.KY/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

Piutang Bukan Pajak
Rp4.198.210.301,00

C.1.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp4.198.210.301,00 dan Rp4.302.030.241,00 yang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Saldo Piutang Bukan Pajak berasal dari hasil pemeriksaan khusus APIP KYRI atas kelebihan pembayaran ULP&ULS periode Mei s.d Desember 2009; 2010; 2011; 2012 dan Januari s.d Maret 2013. Atas hasil pemeriksaan khusus tersebut, Sekretaris Jenderal telah melimpahkan penanganan selanjutnya kepada pihak berwajib dalam hal ini Kejaksaan Agung melalui surat nomor 213/SET.KY/01/2014 tanggal 27 Januari 2014 dan sampai saat ini masih dalam proses oleh pihak yang berwajib

Selama Tahun 2014 Komisi Yudisial menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp103.819.940,00 sehingga saldo per 31 Desember 2014 menjadi Rp4.198.210.301,00. PNPB tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pengembalian Kerugian Negara dalam kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Laporan Masyarakat sebesar Rp103.557.600,00 tanggal 28 Februari 2014.
- 2) Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL berupa kekurangan nilai SKTJM atas kelebihan pembayaran uang layanan penanganan/penyelesaian laporan masyarakat dan uang layanan persidangan sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 sebesar Rp262.340,00.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-Piutang
Bukan Pajak
(Rp4.198.210.301,00)*

C.1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Putang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar (Rp4.198.210.301,00) dan Rp0,00

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Komisi Yudisial melakukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak dikarenakan terdapat pertimbangan kemungkinan tidak dapat diterimanya pembayaran atas piutang tersebut dimasa datang. Pertimbangan tersebut berdasarkan atas:

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:68/Pid.SUS/TPK/2014/ PN.Jkt.pst. tanggal 24 Nopember 2014
2. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 18 sebagai berikut:
 - 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan

adalah:

- a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Persediaan

Rp449.248.534,00

C.1.6 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp449.248.534,00 dan Rp547.186.590,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 14.

Tabel 14
Rincian Persediaan

No	Jenis	Per 31 Desember 2014	Per 31 Desember 2013
1	Barang Konsumsi	178.279.823,00	294.262.452,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	7.917.120,00	8.947.400,00
3	Suku Cadang	0,00	0,00
4	Barang Lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	190.031.050,00	156.360.350,00
5	Persediaan Lainnya	73.020.541,00	87.616.388,00
Jumlah		449.248.534,00	547.186.590,00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp118.012.118.552,00

C.2 Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebesar Rp118.012.118.552,00 dan Rp122.027.276.590,00 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 15.

Tabel 15
Rincian Aset Tetap

No	Jenis	Per 31 Desember 2014	Per 31 Desember 2013
1	Tanah	47.188.389.400,00	47.188.389.400,00
2	Peralatan dan Mesin	37.293.888.820,00	35.897.228.395,00
3	Gedung dan Bangunan	70.841.354.266,00	70.623.104.266,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.530.800.628,00	3.530.800.628,00
5	Aset Tetap Lainnya	741.191.281,00	741.191.281,00
6	Konstruksi dalam pengerjaan	29.000.000,00	29.000.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	(41.612.505.843,00)	(35.982.437.380,00)
Jumlah		118.012.118.552,00	122.027.276.590,00

Tanah
Rp47.188.389.400,00

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Yudisial RI per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar

Rp47.188.389.400,00 dan Rp47.188.389.400,00. Tidak terdapat perubahan aset tetap berupa tanah.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2014 terdiri dari:

Tabel 16
Rincian Saldo Tanah

No	Kode	Luas	Nilai
1	2.01.01.04.001	5.780 m ²	47.188.389.400
Jumlah		5.780 m ²	47.188.389.400

Tanah seluas 5.780 m² terletak di Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta 10450, Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Peralatan dan Mesin
Rp37.293.888.820,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp37.293.888.820,00 dan Rp35.897.228.395,00. Nilai Netto Peralatan dan mesin per 31 Desember 2014 sebesar Rp6.872.144.819,00 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp30.421.744.001,00.

Kenaikan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2013	35.897.228.395,00
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	1.511.363.475,00
- Kapitalisasi terhadap belanja barang	52.984.000,00
Mutasi Kurang :	
- Peralatan dan Mesin yang tidak dapat digunakan	(167.687.050,00)
Saldo per 31 Desember 2014	37.293.888.820,00

Mutasi penambahan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.511.313.475,00 berasal dari pembelian menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.484.813.475,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp26.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Inventaris Kantor KYRI sesuai dengan kuitansi/bukti pembayaran No.331-A/BA.PEMB/PPK-1.KY/03/2014 tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp32.569.375,00 an.CV.Topan Endah Mandiri, SPM Nomor:00218/KYRI/2014 tanggal 3 April 2014, SP2D Nomor:141331302001314 tanggal 10 April 2014.

- 2) Pengadaan Alat Pendukung Aplikasi Komisi Yudisial sesuai Kontrak No.346/SPK/99K-1.KY/03/2014 tanggal 13 Maret 2014 sebesar Rp92.322.100,00 an. PT.Godean Jaya Permai, SPM Nomor:00422/KYRI/2014 tanggal 22 Mei 2014, SP2D Nomor: 141331301017260 tanggal 13 Juni 2014.
- 3) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Tahun Anggaran 2014, sesuai Kontrak No.716/Perj/PPK-1.KY/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp554.100.800,00 an.CV.Resik Karya Utama, SPM Nomor:00529/ KYRI/2014 tanggal 20 Juni 2014, SP2D Nomor:141331302004857 tanggal 14 Juli 2014
- 4) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2014, sesuai Kontrak No.1241/Perj/PPK-1.KY/09/2014 tanggal 8 September 2014 sebesar Rp243.309.000,00 an.PT.Khronz Indonesia, SPM Nomor:00815/KYRI/2014 tanggal 1 Oktober 2014, SP2D Nomor:141331301039175 tanggal 17 Oktober 2014
- 5) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1491-A/BA-PEMB/PPK-1.KY/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp20.837.500,00 an.PT.Sagatra Upaya Citra, SPM Nomor:01000/KYRI/2014 tanggal 11 Nopember 2014, SP2D Nomor:141331304000040 tanggal 13 Nopember 2014
- 6) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1681-A/PEM/PPK.1/12/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp43.021.000,00 an.CV.Satuvisi Multimedia, SPM Nomor:01174/KYRI/2014 tanggal 12 Desember 2014, SP2D Nomor:141331304000040 tanggal 13 Nopember 2014
- 7) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Makassar, Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1632-A/PEM/PPK.1/11/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp38.951.000,00 an.CV.Rizqi Insani, SPM Nomor:01172/KYRI/2014 tanggal 12 Desember 2014, SP2D

- Nomor:141331302012915 tanggal 19 Desember 2014
- 8) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Semarang, Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1633-A/PEM/PPK.1/11/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp44.569.800,00 an.CV.Elsa Karya Sentosa, SPM Nomor:01182/KYRI/2014 tanggal 15 Desember 2014, SP2D Nomor:141331302012916 tanggal 19 Desember 2014
- 9) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Samarinda, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1631-A/PEM/PPK.1/11/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp25.916.000,00 an.PT.Abadi Kencana Prakusya, SPM Nomor:01173/KYRI/2014 tanggal 12 Desember 2014, SP2D Nomor:141331303026389 tanggal 19 Desember 2014
- 10) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Palembang, Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014, sesuai kontrak No.1632/SPK/PPK-1.KY/11/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp59.063.400,00 an.CV.Duta Sejahtera, SPM Nomor:01165/KYRI/2014 tanggal 11 Desember 2014, SP2D Nomor:141331301058892 tanggal 23 Desember 2014
- 11) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Manado, Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1631/SPK/PPK-1.KY/11/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp66.456.000,00 an.PT.Telaga Gelang Indonesia, SPM Nomor:01162/KYRI/2014 tanggal 11 Desember 2014, SP2D Nomor: 141331301058893 tanggal 23 Desember 2014
- 12) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Medan, Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1634-A/PEM/PPK.1/11/2014 tanggal 25 Nopember 2014 sebesar Rp43.272.500,00 an.CV.Tangga Rezeki, SPM Nomor:01175/KYRI/2014 tanggal 12 Desember 2014, SP2D Nomor: 141331301058895 tanggal 23 Desember 2014
- 13) Pengadaan Barang Inventaris Kantor Penghubung Komisi

B/BAST/PPBJ.KY/03/2013 tanggal 22 Maret 2013.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp41.612.505.843,00)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing (Rp41.612.505.843,00) dan (Rp35.982.437.380,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2014 tersaji pada Tabel 19.

Tabel 19
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	47.188.389.400,00	0,00	47.188.389.400,00
2	Peralatan dan Mesin	37,293.888.820,00	(30,421,744.001,00)	6.872.144.819,00
3	Gedung dan Bangunan	70,841,354,266,00	(7.759.240.319,00)	63.082.113.947,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,530,800,628,00	(3.431.521.523,00)	99.279.105,00
5	Aset Tetap Lainnya	741.191.281,00	0,00	741.191.281,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
	Jumlah	159,624.624.395,00	(41,612,505.843,00)	118,012.118.552,00

Aset Lainnya

Rp2.330.034.798,00

C.3 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp2.330.034.798,00 dan Rp1.838.089.798,00 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 20.

Tabel 20
Rincian Aset Lainnya

No	Jenis	Per 31 Desember 2014	Per 31 Desember 2013
1	Aset Tak Berwujud	2.330.034.798,00	1.838.089.798,00
2	Aset Lain-lain		
3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		
Jumlah		2.330.034.798,00	1.838.089.798,00

Aset Tak Berwujud

Rp2.330.034.798,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah Rp2.330.034.798,00 dan Rp1.838.089.798,00 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Komisi Yudisial berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Sedangkan mutasi Aset Tak Berwujud pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2013	1.838.089.798,00
Mutasi Tambah :	
- Pembelian	491.945.000,00
Mutasi Kurang :	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0,00
Saldo per 31 Desember 2014	2.330.034.798,00

Mutasi penambahan Aset Tak Berwujud pada Tahun 2014 sebesar

Rp491.945.000,00 menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp427.089.000,00 dan Belanja Modal Fisik Lainnya sebesar Rp64.856.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengadaan *Operating System* Tahun Anggaran 2014, sesuai Kontrak No.896/Perj/PPK-1.KY/07/2014 tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp192.445.000,00 an.PT.Amtek Solusindo , SPM Nomor:00673/ KYRI/2014 tanggal 12 Agustus 2014, SP2D Nomor:141331301031631 tanggal 4 September 2014
- 2) Pengadaan Aplikasi E-Monev Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1703-A/PEM/PPK.1/11/2014 tanggal 9 Desember 2014 sebesar Rp49.400.000,00 an.CV.Global Mandiri Jaya, SPM Nomor:01183/KYRI/2014 tanggal 15 Desember 2014, SP2D Nomor:141331301058023 tanggal 19 Desember 2014
- 3) Pengadaan Pemutakhiran Aplikasi MoU Komisi Yudisial, sesuai kuitansi/bukti pembayaran No.1556-A/PEM/PPK.1/11/2014 tanggal 10 Nopember 2014 sebesar Rp45.830.000,00 an.CV.Global Mandiri Jaya, SPM Nomor:01187/KYRI/2014 tanggal 16 Desember 2014, SP2D Nomor:141331301058411 tanggal 22 Desember 2014
- 4) Pengadaan Software untuk Web Conference Kantor Penghubung Komisi Yudisial di Daerah Tahun Anggaran 2014, sesuai Kontrak No.1486/SPK/PPK-1.KY/10/2014 tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp196.031.000,00 an.PT.V-Cube Indonesia, SPM Nomor:01196/KYRI/2014 tanggal 9 Desember 2014, SP2D Nomor:141331301059108 tanggal 24 Desember 2014, namun terdapat Software yang memiliki manfaat lisensinya kurang dari 1 tahun dengan nilai sebesar Rp56.617.000,00.
- 5) Pengadaan Software Pendukung Pengembangan Aplikasi KYRI sesuai kontrak No.1591/SPK/PPK-1.KY/11/2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp64.856.000,00 an.PT.Mitra Buana Komputindo, SPM Nomor:01159/KYRI/2014 tanggal 11 Desember 2014, SP2D Nomor:141331301058946 tanggal 23 Desember 2014

KEWAJIBAN

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013

Rp51.421.462,00

tersajisebesar Rp51.421.462,00 dan Rp89.062.147,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan serta barang/jasa yang masih harus diserahkan atas pendapatan pemanfaatan BMN. Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2014 muncul akibat adanya pajak yang masih harus disetorkan serta pendapatan atas sewa lahan kantor yang diterima dimuka.

Utang kepada Pihak
Ketiga

Rp5.850.454,00

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp5.850.454,00 dan Rp16.161.480,00 .

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga sebagai berikut:

1. Biaya Langganan Air dan PAM untuk Kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember Tahun 2014 sebesar Rp609.122,00.
2. Biaya Pengiriman Dokumen/Surat untuk Kantor Komisi Yudisial RI bulan Desember Tahun 2014 sebesar Rp1.278.600,00.
3. Biaya Langganan PDAM untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Semarang bulan Desember Tahun 2014 sebesar Rp74.330,00.
4. Biaya Langganan Kebersihan untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Surabaya bulan Desember Tahun 2014 sebesar Rp85.000,00.
5. Biaya Langganan PDAM untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Mataram bulan Desember Tahun 2014 sebesar Rp100.200,00.
6. Biaya Langganan Listrik untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Manado bulan Desember Tahun 2014 sebesar Rp953.700,00.
7. Biaya Langganan PDAM untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Manado bulan Desember Tahun 2014 sebesar Rp1.573.500,00.

8. Biaya Utility untuk Kantor Penghubung Komisi Yudisial RI di Kota Manado bulan Desember Tahun 2014 sebesar Rp470.000,00.
9. Sisa Dana Operasional Pimpinan Komisi Yudisial RI Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp706.002,00.

Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp10.512.664,00

C.4.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp10.512.664,00 dan Rp72.900.667,00

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp10.512.664,00 berasal dari pendapatan sewa atas sebagian Halaman Gedung Komisi Yudisial yang digunakan untuk Counter/Kios kantin seluas 69m² dengan jangka waktu 12 bulan, terhitung mulai tanggal 1 September 2014 sampai dengan 31 Agustus 2015 berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Sebagian Halaman Untuk Counter/Kios kantin antara Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dengan Koperasi Pegawai Komisi Yudisial Republik Indonesia (KPKY RI) nomor:PERJ-01/BU.KY/8/2014, sedangkan atas barang/jasa selama 8 bulan ke depan (Januari s.d agustus 2015) masih belum diserahkan

Pendapatan Yang
Ditangguhkan
Rp35.058.344,00

C.4.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp35.058.344,00 dan Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek sebagaimana tersebut pada point C.4.1 dan C.4.2.

Termasuk di dalam Utang Jangka Pendek Lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain, utang biaya yang timbul terkait penerimaan jasa yang belum dibayar sampai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan, dan Dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan kepada yang berhak per tanggal neraca.

Utang Jangka Pendek Lainnya berasal dari pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Komisi Yudisial, namun sampai dengan tanggal pelaporan masih ada kendala dalam proses penyetoran, sehingga pajak tersebut belum diterima oleh Negara.

EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar
Rp995.691.503,00

C.5 Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 21.

Tabel 21
Rincian Ekuitas Dana Lancar

No	Aset Lancar	TA 2014	TA 2013
1	Cadangan Piutang	0,00	4.302.030.241,00
2	Cadangan Persediaan	449.248.534,00	547.186.590,00
3	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(5.144.452,00)	(89.062.147,00)
4	Barang/Jasa yang harus diterima	562.100.085,00	0,00
5	Barang/Jasa yang harus diserahkan	(10.512.664,00)	0,00
Jumlah		995.691.503,00	4.760.154.684,00

Cadangan Piutang
Rp0,00

C.5.1 Cadangan Piutang

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-

masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.302.030.241,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Komisi Yudisial RI dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

*Cadangan Persediaan
Rp449.248.534,00*

C.5.2 Cadangan Persediaan

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp449.248.534,00 dan Rp547.186.590,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar Komisi Yudisial RI dalam bentuk persediaan.

*Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Pendek
(Rp5.144.452,00)*

C.5.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing disajikan minus sebesar Rp5.144.452,00 dan Rp89.062.147,00 Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

*Barang/Jasa yang
harus diterima
Rp562.100.085,00*

C.5.4 Barang/Jasa yang harus diterima

Jumlah Barang/Jasa yang harus diterima per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing disajikan sebesar Rp562.100.085,00 dan Rp0,00 Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

*Barang/Jasa yang
harus diserahkan
(Rp10.512.664,00)*

C.5.5 Barang/Jasa yang harus diserahkan

Jumlah Barang/Jasa yang harus diserahkan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing disajikan minus sebesar Rp10.512.664,00 dan Rp0,00 Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

*Ekuitas Dana
Investasi
Rp120.342.153.350,00*

C.6 Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di Aset Tetap, Aset Lainnya dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian nilai Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 22.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
(DALAM RUPIAH)**

Halaman : 1
Prog.Id : lu_pastk

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI
ESELON I : 01 KOMISI YUDISIAL RI
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 439479 KOMISI YUDISIAL RI
JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISAS ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	I PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	0	195,308,428	195,308,428	0.00
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	195,308,428	195,308,428	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	195,308,428	195,308,428	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	II PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI NON KAS	0	0	0	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00
	2. HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A I + A II)	0	195,308,428	195,308,428	0.00
B	BELANJA				
	I BELANJA TRANSAKSI KAS	77,720,059,000	75,668,152,184	(2,051,908,816)	97.36
	Belanja Pegawai	15,412,115,000	14,313,904,560	(1,098,210,440)	92.87
	Belanja Barang	60,022,832,000	59,076,072,149	(946,759,851)	98.42
	Belanja Modal	2,285,112,000	2,278,175,475	(6,936,525)	99.70
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	II BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	578,954,907	578,954,907	0.00
	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00
	Belanja Barang Non Kas	0	578,954,907	578,954,907	0.00
	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0.00
	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00
	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00
	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	77,720,059,000	76,247,107,091	(1,472,951,909)	98.10
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00

Jakarta, 26 Januari 2015

Sekretaris Jenderal

Danang Wijayanto



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI
ESELON I : 01 KOMISI YUDISIAL RI
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 439479 KOMISI YUDISIAL RI
JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : 13 April 2015
Halaman : 1
Prog.Id : lu_paslkt

No	URAIAN	2014				2013			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	0	195,308,428	195,308,428	0.00	0	210,012,315	210,012,315	0.00
AL.1	PENERIMAAN NEGARA	0	195,308,428	195,308,428	0.00	0	210,012,315	210,012,315	0.00
AL.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
AL.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	195,308,428	195,308,428	0.00	0	210,012,315	210,012,315	0.00
AL.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1	PENERIMAAN NEGARA NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.a	Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A.II)	0	195,308,428	195,308,428	0.00	0	210,012,315	210,012,315	0.00
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI KAS	77,720,059,000	75,698,152,184	(2,051,906,816)	97.38	81,588,475,000	88,487,948,133	(5,120,526,867)	94.41
B.I.1	Rupiah Murni	77,720,059,000	75,698,152,184	(2,051,906,816)	97.38	81,588,475,000	88,487,948,133	(5,120,526,867)	94.41
B.I.1.a	Belanja Pegawai	16,412,115,000	14,313,904,580	(1,098,210,440)	92.67	9,111,080,000	8,088,863,519	(42,208,481)	99.64
B.I.1.b	Belanja Barang	60,022,832,000	59,078,072,149	(948,759,851)	98.42	77,418,203,000	72,383,977,478	(5,034,225,524)	93.50
B.I.1.c	Belanja Modal	2,285,112,000	2,278,175,475	(6,936,525)	99.70	5,059,212,000	5,016,117,138	(44,094,862)	99.13
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.c	Belanja Modal	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI
ESELON I : 01 KOMISI YUDISIAL RI
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 439479 KOMISI YUDISIAL RI
JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

Kode Lap. : LRAST
Tanggal : 13 April 2015
Halaman : 2
Prog Id : lu_pastkt

No	URAIAN	2014				2013			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	578,954,907	578,954,907	0.00	0	0	0	0.00
B.II.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.2	Belanja Barang Non Kas	0	578,954,907	578,954,907	0.00	0	0	0	0.00
B.II.3	Belanja Modal Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.6	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)	77,720,059,000	76,247,107,091	(1,472,951,909)	98.10	91,588,475,000	86,467,948,133	(5,120,526,867)	94.41
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Jakarta, 13 April 2015
Sekretaris Jenderal

Danang Wilayanto
NIP. 196204021982031001 



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIET
Tanggal : 13/04/15
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI
UNIT ORGANISASI : 01 KOMISI YUDISIAL RI
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 439479 KOMISI YUDISIAL RI
JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenalkaan (Penurunan)	
	2014	2013	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	35,764,346	0	35,764,346	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	562,100,085	0	562,100,085	0.00
Piutang Bukan Pajak	4,198,210,301	4,302,030,241	(103,819,940)	(2.41)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(4,198,210,301)	0	(4,198,210,301)	0.00
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	0	4,302,030,241	(4,302,030,241)	(100.00)
Persediaan	449,248,534	547,186,590	(97,938,056)	(17.89)
JUMLAH ASET LANCAR	1,047,112,985	4,849,216,831	(3,802,103,846)	(78.40)
ASET TETAP				
Tanah	47,188,389,400	47,188,389,400	0	0.00
Peralatan dan Mesin	37,293,888,820	35,897,228,395	1,396,660,425	3.89
Gedung dan Bangunan	70,841,354,266	70,823,104,266	218,250,000	0.30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,530,800,628	3,530,800,628	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	741,191,281	741,191,281	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29,000,000	29,000,000	0	0.00
Akumulasi Penyusutan	(41,612,505,843)	(35,982,437,380)	(5,630,068,463)	15.64
JUMLAH ASET TETAP	118,012,118,552	122,027,276,590	(4,015,158,038)	(3.29)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	2,330,034,798	1,838,089,798	491,945,000	26.76
JUMLAH ASET LAINNYA	2,330,034,798	1,838,089,798	491,945,000	26.76
JUMLAH ASET	121,389,286,316	128,714,583,219	(7,325,296,904)	(5.89)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,850,454	16,161,480	(10,311,026)	(63.80)
Pendapatan Diterima Dimuka	10,512,664	72,900,667	(62,388,003)	(85.57)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	35,058,344	0	35,058,344	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	51,421,462	89,062,147	(37,640,685)	(42.26)
JUMLAH KEWAJIBAN	51,421,462	89,062,147	(37,640,685)	(42.26)
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	0	4,302,030,241	(4,302,030,241)	(100.00)
Cadangan Persediaan	449,248,534	547,186,580	(97,938,046)	(17.89)
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(5,144,452)	(89,062,147)	83,917,695	(94.22)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan : NSAIE1T
 Tanggal : 13/04/15
 Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 100 KOMISI YUDISIAL RI
 UNIT ORGANISASI : 01 KOMISI YUDISIAL RI
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 439479 KOMISI YUDISIAL RI
 JENIS KEWENANGAN : KP KANTOR PUSAT

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2014	2013	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Barang/Jasa yang Harus Diterima	562,100,085	0	562,100,085	0.00
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(10,512,664)	0	(10,512,664)	0.00
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	995,691,503	4,760,154,684	(3,764,463,181)	(79.08)
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	118,012,118,552	122,027,276,590	(4,015,158,038)	(3.29)
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	2,330,034,798	1,838,089,798	491,945,000	26.76
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	120,342,153,350	123,865,366,388	(3,523,213,038)	(2.84)
JUMLAH EKUITAS DANA	121,337,844,853	128,625,521,072	(7,287,676,219)	(5.66)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	121,389,266,315	128,714,583,219	(7,325,316,904)	(5.69)

Jakarta, 13 April 2015

Sekretaris Jenderal



Danang Wijayanto
 NIP. 196204021982031001

bg

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Telp. (021) 3905876

Fax. (021) 3906215

PO BOX 2685

Email : kyri@komisiyudisial.go.id

www.komisiyudisial.go.id